

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
SIFAT PENGUNGKAPAN SUKARELA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**ARDILLA MAHARDHIKA JOHAN
NIM. C2C607024**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ardilla Mahardhika Johan

Nomor Induk Mahasiswa : C2C607024

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIFAT PENGUNGKAPAN SUKARELA TANGGUNG SOSIAL PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

Dosen Pembimbing : Drs. H. Sudarno, M.Si., Ph.D., Akt.

Semarang, 13 Juni 2011

Dosen Pembimbing,

(Drs. H. Sudarno, M.Si., Ph.D., Akt.)

NIP. 19650520 199001 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Ardilla Mahardhika Johan

Nomor Induk Mahasiswa : C2C607024

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIFAT PENGUNGKAPAN SUKARELA TANGGUNG SOSIAL PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 Juni 2011

Tim Penguji :

1. Drs. H. Sudarno, M.Si., Ph.D., Akt.. (.....)

2. Drs. Agustinus Santosa Adiwibowo, M.Si., Akt. (.....)

3. Surya Rahardja, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ardilla Mahardhika Johan, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sifat Pengungkapan Sukarela Tanggung jawab Sosial (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 13 Juni 2011
Yang membuat pernyataan,

(Ardilla Mahardhika Johan)
NIM : C2C607024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras.

(QS. Al-Insyirah: 6-7)

Tuhan-mulah Yang Maha Mulia. Dia mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

(QS. Al-Alaq: 3-5)

Kegemilangan persahabatan bukanlah dari lengan terulur, atau senyum manis, atau sukacita ditemani, melainkan inspirasi spiritual yang muncul di dalam diri seseorang ketika ia mengetahui bahwa orang lain percaya kepadanya dan bersedia mempercayainya.

(Ralph Waldo Emerson)

Janganlah kecewa bila dunia tidak mengenal Anda Tetapi kecewalah bila Anda tidak mengenal dunia

(Kong Fu Tse)

Skripsi ini aku persembahkan untuk

Ayah, Ibu, Kakak, keluarga dan sahabat-sahabat terbaikku..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sifat pengungkapan sukarela tanggung jawab sosial (prosentase pengungkapan sukarela yang diukur dari aspek kinerja ekonomi berdasarkan GRI).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 71 laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009. Sampel tersebut diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial didasarkan pada enam kategori menurut *Global Reporting Initiative* atau GRI. Kategori tersebut antara lain: aspek ekonomi; aspek lingkungan; aspek hak-hak manusia; aspek praktik tenaga kerja dan pekerjaan yang layak; aspek tanggung jawab produk; dan aspek sosial. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi sifat pengungkapan tanggung jawab sosial antara lain kepemilikan manajemen, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tipe industri. Dalam penelitian ini, variabel tipe industri dibagi menjadi dua yaitu industri pabrikan atau manufaktur dan industri non manufaktur. Metode pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, dan tipe industri berpengaruh secara signifikan terhadap sifat pengungkapan sukarela tanggung jawab sosial. Faktor-faktor lain yang diteliti dalam penelitian ini seperti kepemilikan manajemen, *leverage*, dan profitabilitas tidak mempengaruhi sifat pengungkapan sukarela tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

Kata kunci : CSR, Pengungkapan Sukarela, Kepemilikan Manajemen, Tipe Industri

ABSTRACT

This research is aimed to determine the factors that influence to the nature of CSR disclosure (percentage of voluntary disclosure which measured from the economic performance aspect based on GRI). The sample that used in this research were 71 annual report of listed companies in Indonesia Stock Exchange in 2009. The sample is obtained using a purposive sampling method.

CSR index were based on six categories according to Global Reporting Initiative or GRI. Categories include: economic; environment; human rights; labor practices and decent work; product responsibility; and social. Factors thought to affect the nature of CSR, among management ownership, leverage, profitability, corporate size, and the type of industry. In this research, the type of industry were divided into two categories, namely manufacturing industry and nonmanufacturing industry. Hypothesis testing method used is multiple regression analysis.

The result of this research showed that the corporate size and the type of industry significantly influence the nature of voluntary disclosure of CSR. Other factors examined in this research such as management ownership, leverage, and profitability do not affect the nature of voluntary disclosure of CSR by the companies.

Keywords : CSR, Voluntary Disclosure, Management Ownership, Industry Type

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Alhamdulillah robbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIFAT PENGUNGKAPAN SUKARELA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana S-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Proses penyelesaian skripsi tentu saja tidak lepas dari peran serta keluarga, teman-teman dan sahabat yang begitu besar, serta dosen pembimbing yang banyak memberikan bimbingan dan arahan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rohman, SE, M.Si, Akt., selaku dosen wali yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
3. Bapak Drs. H. Sudarno, M.Si., Ph.D., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan senantiasa membantu penulis saat penulis mengalami kesulitan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh dosen dan staf Akuntansi atas ilmu yang bermanfaat yang diberikan untuk penulis dan atas segala bantuan yang diberikan selama penulis menjalani study di Fakultas Ekonomi.

5. Ayah dan Ibu tersayang atas doa yang tidak pernah putus untuk penulis. Atas segala dukungan baik moral maupun material, dan kasih sayang yang begitu besar. Entah bagaimana penulis bisa membalasnya, semoga penulis dapat selalu membahagiakan Ayah dan Ibu.
6. Kakakku, Destarika Irene Johan, terima kasih atas segala doa dan dukungannya.
7. Segenap saudara dan keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan untuk penulis.
8. Teman-teman yang secara langsung membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Riska, yang dengan ikhlas meminjamkan modemnya. Luthfi, yang banyak memberikan bantuan dan masukan. Dody, yang membantu mencarikan *annual report* dan selalu memberikan dukungan. Ageng dan Dhema, yang banyak membagi ilmunya kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
9. Sahabat-sahabat terbaik, Cihuy (Putri, Renny, Ayu, Mendy) dan GGR (Riska, Diana, Wiedz, Radit, Yudha, Wawan) atas segala doa, dukungan, dan hari-hari yang indah bersama kalian. *Love u so much..*
10. Seluruh teman-teman Akuntansi, khususnya kelas B Reguler II angkatan 2007. Kebersamaan selama 4 tahun ini tidak mungkin penulis lupakan.
11. Teman-teman KKN Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus (Luthfi, Suci, Anik, Kika, Kiki, Romi, Damar, dan Hendra). Teman-teman dan Terban adalah keluarga dan kampung halaman kedua bagi penulis.
12. Teman-teman kost Tembalang Regency BA/55, terimakasih atas segala toleransi dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi di kost. Senang sekali bisa tinggal bersama kalian.
13. Orang-orang yang pernah mengisi hari-hari dan memberikan kenangan, tawa maupun tangis selama penulis menjalani masa perkuliahan.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Semarang, 13 Juni 2011

Ardilla Mahardhika Johan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Teori <i>Stakeholders</i>	14
2.2 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	16

2.2.1 Dasar Laporan Tanggung Jawab Sosial.....	24
2.2.2 Sifat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.....	27
2.2.3 Pengukuran Tanggung Jawab Sosial.....	29
2.3 Faktor Penentu Sifat Pengungkapan Sukarela Tanggung Jawab Sosial.....	38
2.3.1 Kepemilikan Manajemen.....	38
2.3.2 <i>Leverage</i>	39
2.3.3 Profitabilitas.....	40
2.3.4 Ukuran Perusahaan	40
2.3.5 Tipe Industri.....	41
2.4 Penelitian Terdahulu	42
2.5 Kerangka Pemikiran.....	45
2.6 Perumusan Hipotesis.....	46
2.6.1 Pengaruh Kepemilikan Manajemen Terhadap Sifat Pengungkapan Sukarela Tanggung Jawab Sosial	46
2.6.2 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Sifat Pengungkapan Sukarela Tanggung Jawab Sosial.....	47
2.6.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Sifat Pengungkapan Sukarela Tanggung Jawab Sosial.....	48
2.6.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Sifat Pengungkapan Sukarela Tanggung Jawab Sosial	48
2.6.5 Pengaruh Tipe Industri Terhadap Sifat Pengungkapan Sukarela Tanggung Jawab Sosial	49
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	50
3.1.1 Variabel Dependen (Y)	50
3.1.2 Variabel Independen (X).....	51
3.1.2.1 Kepemilikan Manajemen (X ₁).....	51
3.1.2.2 <i>Leverage</i> (X ₂).....	52
3.1.2.3 Profitabilitas (X ₃)	52

3.1.2.4 Ukuran Perusahaan (X_4)	53
3.1.2.5 Tipe Industri (X_5)	54
3.2 Populasi dan Sampel	54
3.3 Jenis dan Sumber Data	55
3.4 Metode Pengumpulan Data	56
3.5 Metode Analisis	57
3.5.1 Statistik Deskriptif	57
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	57
3.5.2.1 Uji Normalitas	57
3.5.2.2 Uji Multikolinieritas	58
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	58
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	59
3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda	59
3.5.4 Pengujian Hipotesis	40
3.5.3.1 Uji Statistik F	60
3.5.3.2 Koefisien Determinasi	61
3.5.3.3 Uji Hipotesis	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	63
4.2 Analisis Data	63
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	63
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	66
4.2.2.1 Uji Normalitas	66
4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas	68
4.2.2.3 Uji Multikolinieritas	69
4.2.2.4 Uji Autokorelasi	70
4.2.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	71
4.2.3.1 Hasil Uji Statistik F	71
4.2.3.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi	71
4.2.3.3 Hasil Uji Hipotesis	72
4.3 Interpretasi Hasil	75

4.3.1 Pengaruh Kepemilikan Manajemen Terhadap Sifat Pengungkapan Sukarela Tanggung Jawab Sosial	75
4.3.2 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Sifat Pengungkapan Sukarela Tanggung Jawab Sosial	76
4.3.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Sifat Pengungkapan Sukarela Tanggung Jawab Sosial	77
4.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Sifat Pengungkapan Sukarela Tanggung Jawab Sosial	78
4.3.5 Pengaruh Tipe Industri Terhadap Sifat Pengungkapan Sukarela Tanggung Jawab Sosial	79
BAB V PENUTUP.....	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Keterbatasan.....	82
5.3 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Aspek-Aspek Kriteria CSR.....	22
Tabel 2.2 Kategori dalam <i>Corporate Sustainability Reporting</i>	30
Tabel 2.3 <i>Global Reporting Initiative</i>	31
Tabel 2.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu	44
Tabel 3.1 Sampel Penelitian.....	55
Tabel 4.1 Proses Pemilihan Sampel	63
Tabel 4.2 Deskriptif Variabel Penelitian.....	64
Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas-Uji Glejser.....	69
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	70
Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	73
Tabel 4.6 Ringkasan Hasil Penelitian	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Teori Piramida.....	19
Gambar 2.2 Teori <i>Triple Bottom Line</i>	20
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	46
Gambar 4.1 Uji Normalitas: Grafik Histogram.....	66
Gambar 4.2 Uji Normalitas: Grafik <i>Normal P-P Plot</i>	67
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel	87
Lampiran B <i>Content Analysis</i> Index Pengungkapan CSR	89
Lampiran C Output SPSS	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah perusahaan atau badan usaha, kegiatan bisnis menjadi perilaku utama dari para pelaku bisnis. Perusahaan dianggap sebagai lembaga yang memberikan keuntungan bagi masyarakat. Sesuai dengan teori akuntansi tradisional, perusahaan harus dapat memaksimalkan labanya agar dapat memberikan sumbangan yang maksimum kepada masyarakat. Namun, kegiatan bisnis tersebut tetap berorientasi pada keuntungan tanpa dibatasi oleh perbedaan sistem hukum. Kegiatan bisnis tersebut terutama yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam seperti perusahaan manufaktur baik secara langsung maupun yang tidak langsung tentu memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya seperti masalah-masalah polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Adanya dampak pada lingkungan tersebut mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan *CSR (Corporate Social Responsibility)*, sebuah konsep yang tengah berkembang pesat dalam dunia industri.

CSR adalah komitmen perusahaan yang menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan etika bisnis dan praktik bisnis yang berkesinambungan (*sustainable*) secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Konsep ini berkaitan dengan perlakuan terhadap *stakeholder* baik yang berada di dalam dan di luar perusahaan secara bertanggungjawab baik secara etika maupun sosial. Hal terpenting dari

pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar *stakeholder* yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat di sekitarnya. CSR juga mengandung pengertian bahwa seperti halnya individu, perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas, dan tidak korup. Tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi suatu kebutuhan yang dirasakan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha berdasarkan prinsip kemitraan dan kerjasama (Departemen Sosial, 2007).

Berdasarkan sifatnya, pengungkapan tanggung jawab sosial dibagi menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang berlaku secara wajib yang diisyaratkan oleh ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. Peraturan mengenai pengungkapan wajib dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-97/PM/1996, yang kemudian diubah menjadi surat keputusan ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 (peraturan VIII.G.7). Peraturan lain tentang pengungkapan informasi wajib yang dikeluarkan oleh Bapepam adalah surat keputusan ketua Bapepam No. Kep-7/PM/1995 yang diubah menjadi keputusan ketua Bapepam No. Kep38/PM/1996 (peraturan VIII.G.2). Peraturan tersebut menjelaskan keharusan mengungkapkan informasi akuntansi kepada publik dalam laporan tahunan. Pengungkapan wajib bersifat mengikat, sehingga apabila perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan

wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diikat oleh peraturan yang berlaku. Untuk jenis pengungkapan ini perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan yang dipandang relevan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Lebih jauh dijelaskan bahwa pengungkapan sukarela adalah perwujudan dari pengungkapan yang diperluas dan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri dengan mempertimbangkan faktor biaya dan manfaat (Chairir dan Ghazali, 20003 dalam Noormala, 2010). Pengungkapan sukarela muncul karena adanya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar, keberhasilan perusahaan tidak hanya pada menghasilkan laba saja tetapi ditentukan juga oleh kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitar (Yuliani, 2003). Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat *voluntary* (sukarela), *unaudited* (belum diaudit), dan *unregulated* (tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu).

Salah satu aspek yang mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya adalah aspek hukum. Praktik pelaporan tanggung jawab sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 (b) menyatakan bahwa "setiap penanam

modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Adanya Undang-Undang tersebut menunjukkan manifestasi tentang kepedulian pemerintah akan masalah-masalah sosial yang menjadi tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk lebih bertanggungjawab terhadap lingkungan sosialnya. Namun di sisi lain, pengesahan Undang-Undang tersebut juga menimbulkan penolakan dari berbagai pihak karena beberapa alasan, antara lain:

1. Belum jelasnya kriteria perusahaan yang digolongkan mempunyai usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam.
2. Dianggap menjadi tambahan biaya bagi perusahaan dan menjadi salah satu sumber biaya ekonomi “tinggi” sehingga berdampak buruk terhadap iklim investasi.
3. Belum jelas mekanisme tentang sumber dana, besarnya alokasi, siapa pemungut dan pengawas pelaksanaan CSR.
4. CSR bersifat *Mandatory* dan adanya sanksi bagi yang tidak melaksanakannya.

Pada Pasal 74 khususnya, pasal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi praktik tanggung jawab sosial yang selama ini berjalan namun belum diatur dalam undang-undang lama. Namun secara teori pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dibuat *mandatory* masih meragukan karena begitu banyak aspek yang harus dicermati. Pendekatan secara regulasi diharapkan dapat meningkatkan semangat pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan baik dan benar, serta mampu menegakkan prinsip transparansi dan *fairness* dalam dunia bisnis. Pelaksanaan

tanggung jawab sosial dengan kesadaran tulus hendaknya tetap menjadi prioritas utama, sehingga hukum dapat berperan maksimal dalam mengarahkan dan mendisiplinkan kegiatan tersebut. Bukan sebaliknya, hukum justru menghambat kreativitas dan ketulusan dalam melakukan tanggung jawab sosialnya.

Pentingnya praktik pengungkapan tanggung jawab sosial telah menarik banyak peneliti untuk melakukan beberapa penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan seperti yang telah banyak dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Belkaoui dan Krapik (1989); Cowen, (1987); Hackston dan Milne (1996); Sembiring (2005) dan Anggraeni (2006) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial. Diantara faktor-faktor yang menjadi variabel dalam penelitian tersebut adalah faktor-faktor keuangan yang meliputi ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, *leverage*, serta faktor lain berupa tipe industri yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kepemilikan manajemen menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan manajemen, semakin tinggi pula motivasi untuk mengungkapkan aktivitas perusahaan yang dilakukan (Fama dan Jensen, 1983). Kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap pengeluaran program CSR, namun pada suatu titik tertentu hal tersebut dapat mengurangi nilai perusahaan dan batasan yang telah dicapai sehingga menyebabkan suatu hubungan negatif (Morck *et al.*, 1988). Penelitian Nasir dan Abdullah (2004), Anggraini (2006) dan Rosmasita (2007) menemukan adanya hubungan positif antara kepemilikan manajemen

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun ketidakkonsistenan hasil ditunjukkan oleh penelitian Said *et al.* (2009) yang menemukan bahwa kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi sifat pengungkapan tanggung jawab sosial adalah *leverage*. *Leverage* merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi wajib melakukan pengungkapan yang lebih luas agar tidak terjadi kecenderungan untuk untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba dimasa depan, karena perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi biasanya akan lebih sedikit mengungkapkan tanggung jawab sosialnya agar dapat melaporkan laba sekarang yang lebih tinggi. Penelitian terdahulu yang dilakukan Ainun Na'im dan Fu'ad Rakhman (2000) membuktikan bahwa rasio *leverage* memiliki hubungan yang positif dengan kelengkapan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam penelitian ini, profitabilitas diperkirakan akan mempengaruhi sifat pengungkapan tanggung jawab sosial. Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka manajer akan semakin terdorong untuk mengungkapkan informasi lebih terperinci sebab mereka ingin meyakinkan investor mengenai profitabilitas mereka. Hubungan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial menurut Bowman dan Haire (1976) dalam Heckston dan Milne (1996) dijelaskan dengan rinci bahwa kepekaan sosial membutuhkan gaya

managerial yang sama sebagaimana yang diperlukan untuk dapat membuat perusahaan menguntungkan (*profitable*). Penelitian yang dilakukan oleh Bowman dan Haire (1976) serta Preston (1978) dalam Hackston dan Milne (1996) mendukung hubungan profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan penelitian yang dilakukan Hackston dan Milne (1996) dan Belkaoui dan Karpik (1989) melaporkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ukuran perusahaan menggambarkan besarnya total *assets* yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dibanding perusahaan yang lebih kecil. Pengaruh kedua variabel ini tercermin dalam teori agensi yang menjelaskan bahwa perusahaan besar mempunyai biaya agensi yang besar, oleh karena itu perusahaan besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi daripada perusahaan kecil. Akan tetapi, tidak semua penelitian mendukung hubungan antara ukuran perusahaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang tidak berhasil menunjukkan hubungan kedua variabel ini seperti yang disebutkan dalam Hackston dan Milne (1996) antara lain Roberts (1992), Singh dan Ahuja (1983), Davey (1982) dan Ng (1985). Sebaliknya penelitian yang berhasil menunjukkan hubungan kedua variabel ini antara lain Belkaoui dan Karpik (1989), Adam *et. al.*, (1995, 1998), Hackston dan Milne (1996), Kokubu *et. al.*, (2001), Hasibuan (2001), Sembiring (2005) dan Anggraeni (2006).

Tipe industri juga diduga sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap sifat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Tipe industri

diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu pabrikasi atau manufaktur dan non manufaktur. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suripto (2000), variabel industri yang dikelompokkan ke dalam perusahaan bank dan non bank, hasilnya tidak signifikan. Subiyantoro (dalam Rahayu, 2006) menggunakan variabel industri yang dikelompokkan ke dalam perusahaan manufaktur dan non manufaktur, tetapi hasilnya tidak signifikan. Dalam penelitian Rahayu (2006), variabel industri yang dikelompokkan ke dalam perusahaan jasa dan non jasa (riil), hasilnya juga tidak signifikan. Sedangkan dalam penelitian Yuningsih (2003) dan Sembiring (2005) yang menggunakan variabel industri yang dikelompokkan dalam industri *high profile* dan *low profile* memberikan hasil yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang bertipe *high profile* dalam melakukan aktivitasnya banyak memodifikasi lingkungan, dan menimbulkan dampak sosial yang negatif terhadap masyarakat, atau secara luas terhadap stakeholdersnya. Cooke (dalam Suripto, 2000) menyatakan bahwa luas pengungkapan dalam laporan tahunan mungkin tidak sama untuk semua sektor ekonomi, hal ini mungkin dikarenakan perbedaan sifat dan karakteristik industri. Sedangkan penelitian Gunawan (2002) membuktikan bahwa faktor kelompok industri mempengaruhi luas pengungkapan sukarela.

Berdasarkan penelitian Hackston & Milne (dikutip oleh Sitepu dan Siregar, 2007) ukuran perusahaan dan tipe industri memiliki hubungan signifikan dengan pengungkapan informasi sosial, sebaliknya tidak ditemukan hubungan antara laba dengan pengungkapan informasi sosial. Fitriani (dikutip oleh Sitepu dan Siregar, 2007) menemukan bahwa pengungkapan informasi sosial

dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, status perusahaan, profitabilitas dan KAP. Penelitian Sembiring (2005) menemukan bahwa ukuran perusahaan, profile dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi sosial perusahaan, namun tidak menemukan hubungan signifikan antara profitabilitas dan leverage dengan pengungkapan informasi sosial. Anggraini (2006) menemukan hubungan signifikan antara persentase kepemilikan manajemen dengan pengungkapan informasi sosial, namun tidak berhasil membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap kebijakan pengungkapan informasi sosial oleh perusahaan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sudah banyak penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini lebih menekankan pelaksanaan tanggung jawab sosial dari segi sifatnya. Terutama luas pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan. Atas dasar latar belakang tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIFAT PENGUNGKAPAN SUKARELA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan motivasi yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sifat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Khususnya

perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar (*go public*) di Bursa Efek Indonesia.

Perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah kepemilikan manajemen mempengaruhi sifat pengungkapan sukarela tanggung jawab sosial?
2. Apakah *leverage* mempengaruhi sifat pengungkapan sukarela tanggung jawab sosial?
3. Apakah profitabilitas mempengaruhi sifat pengungkapan sukarela tanggung jawab sosial?
4. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi sifat pengungkapan sukarela tanggung jawab sosial?
5. Apakah tipe industri mempengaruhi sifat pengungkapan sukarela tanggung jawab sosial?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bagian ini akan membahas dua hal, yaitu tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Adapun uraian masing-masing bagian adalah sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menguji pengaruh kepemilikan manajemen terhadap sifat pengungkapan sukarela tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Menguji pengaruh *leverage* terhadap sifat pengungkapan sukarela tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap sifat pengungkapan sukarela tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap sifat pengungkapan sukarela tanggung jawab sosial.
5. Menguji pengaruh tipe industri terhadap sifat pengungkapan sukarela tanggung jawab sosial perusahaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan bagi manajemen mengenai pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial dan praktik-praktik pengungkapan CSR di kalangan perusahaan agar dapat menerapkannya secara lebih baik di lapangan.

2. Bagi Regulator

Menjadi salah satu sumber pertimbangan dalam pembuatan regulasi yang berkenaan dengan praktik tanggung jawab sosial perusahaan dan memberikan masukan untuk meningkatkan regulasi yang sudah ada.

3. Bagi Akademisi dan Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan wawasan terhadap pengembangan praktik tanggung jawab sosial khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sifat pengungkapan sukarela tanggung jawab sosial.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya mengenai sifat pengungkapan sukarela tanggung jawab sosial.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Stakeholder

Menurut Freeman dan McVea (2001), *stakeholder* adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan yang muncul pada pertengahan tahun 1980-an ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang responsif terhadap masalah yang dihadapi para manajer saat itu yaitu perubahan lingkungan (Freeman dan McVea, 2001). Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, dan untuk mendapatkan dukungan dari *stakeholder* perusahaan harus memberikan manfaat bagi para *stakeholdernya*.

Definisi lain diungkapkan oleh Wibisono (dalam Kirana, 2009) yang mengartikan *stakeholders* sebagai pemangku kepentingan yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh perusahaan. Sedangkan menurut Rhenald Kasali sebagaimana dikutip oleh Wibisono (dalam Kirana, 2009), yang dimaksud para pihak adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Dalam hal ini Rhenald Kasali membagi *stakeholders* menjadi sebagai berikut:

a. *Stakeholder internal* dan *stakeholder eksternal*

Stakeholder internal adalah *stakeholder* yang berada di dalam lingkungan organisasi (karyawan, manajer, dan pemegang saham/*shareholder*). Sedangkan *stakeholder* eksternal adalah *stakeholder* yang berada diluar lingkungan organisasi (penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, dan sebagainya).

b. *Stakeholder primer*, *stakeholder sekunder* dan *stakeholder marjinal*

Stakeholders primer adalah *stakeholders* yang dianggap paling penting, *stakeholder* sekunder adalah *stakeholder* yang kurang penting, dan *stakeholders* marjinal adalah yang biasa diabaikan. Urutan prioritas ini berbeda-beda bagi setiap perusahaan meskipun produk atau jasanya sama dan bisa berubah dari waktu ke waktu.

c. *Stakeholders* tradisional dan *stakeholder* masa depan

Yang dimaksud dengan *stakeholder* tradisional adalah karyawan dan konsumen, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan *stakeholder* masa depan adalah *stakeholder* yang pada masa mendatang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial.

d. *Proponents*, *opponents*, dan *uncommitted* (pendukung, penentang, dan yang tidak peduli)

Di antara *stakeholder* ada kelompok yang memihak organisasi (*proponents*), menentang organisasi (*opponents*) dan yang tidak peduli atau mengabaikan (*uncommitted*). Dalam hal ini, organisasi perlu untuk mengenal

stakeholder yang berbeda-beda ini, agar dapat melihat permasalahan dengan jernih, serta dapat menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proporsional.

e. *Silent majority* dan *vocal minority* (pasif dan aktif)

Dilihat dari aktivitas *stakeholder* dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan atau dukungannya secara *vokal* atau aktif dan ada pula yang menyatakan secara *silent* atau pasif.

2.2 *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*

Sebuah definisi yang luas mengenai CSR diungkapkan oleh *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak dibidang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menyatakan bahwa CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya” (Kotler dan Lee 2005).

Menurut International Finance Corporation, CSR didefinisikan sebagai:

“ The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employers and their representatives the local community and large to improve quality of life, in that are both good for business and good foe development.”

Definisi tersebut dapat diartikan sebagai komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama

dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan.

Sedangkan menurut Untung (2008:1) CSR merupakan komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek sosial, ekonomis, dan lingkungan.

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan berfokus pada tiga hal, antara lain profit, lingkungan dan masyarakat. Dengan diperolehnya laba, perusahaan dapat memberikan deviden bagi pemegang saham, mengalokasikan laba yang diperoleh guna membiayai pertumbuhan dan pengembangan usaha dimasa depan, serta membayar kewajiban pajak bagi pemerintah. Dengan lebih banyak memberikan perhatian terhadap lingkungan sekitar, perusahaan turut berpartisipasi terhadap usaha pelestarian lingkungan dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Konsumen akan lebih loyal terhadap produk-produk yang dihasilkan perusahaan yang konsisten menjalankan CSR sehingga memiliki reputasi yang baik (Susanto, 2007:31). Dari sisi perusahaan, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari aktivitas CSR (Susanto, 2007:31), antara lain:

1. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan.
2. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang disebabkan suatu krisis.

3. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang mempunyai reputasi baik, yang secara berkelanjutan melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
4. CSR yang dilaksanakan secara berkelanjutan akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholdernya*.
5. Meningkatkan penjualan. Konsumen akan lebih loyal terhadap produk-produk yang dihasilkan perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara berkelanjutan sehingga memiliki reputasi yang baik.

Kotler dan Lee (2005) menyatakan bahwa partisipasi perusahaan dalam berbagai bentuk tanggung jawab sosial dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, antara lain :

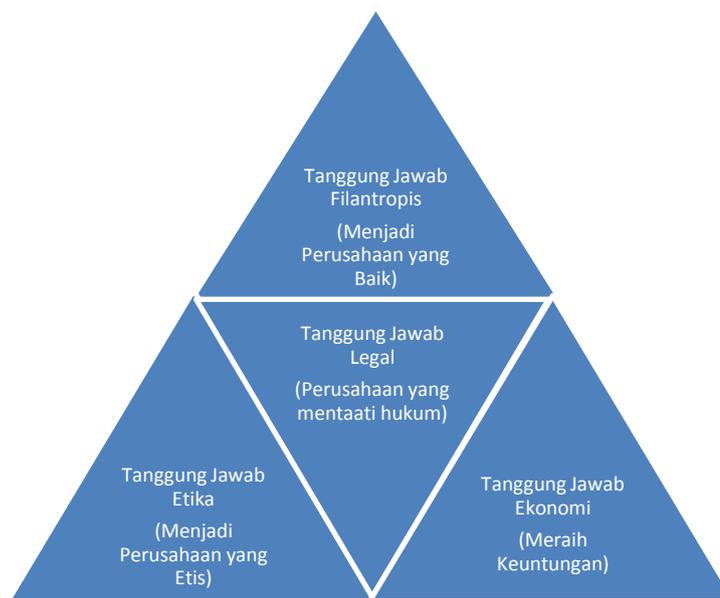
1. meningkatkan penjualan dan *market share*,
2. memperkuat *brand positioning*,
3. meningkatkan *image* dan pengaruh perusahaan,
4. meningkatkan kemampuan untuk menarik hati, memotivasi, dan mempertahankan (*retain*) karyawan
5. menurunkan biaya operasional, dan
6. meningkatkan hasrat bagi investor untuk berinvestasi.

Keberadaan CSR yang telah dikenal semenjak tahun 1970an didukung sejumlah teori. Teori-teori yang berkaitan dengan CSR antara lain:

a. Teori Piramida

Teori piramida ditemukan oleh Carrol (2006). Dalam teori ini, CSR dapat dilihat melalui empat jenjang yang merupakan satu kesatuan. Jika digambarkan akan tampak dalam gambar gambar 2.1:

GAMBAR 2.1
TEORI PIRAMIDA



Sumber : <http://www.cbe.wvu.edu/dunn/rprnts.pyramidofcsr.pdf>

Gambar teori piramida tersebut menjelaskan empat jenjang yang dilalui perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya. Jenjang yang pertama adalah Tanggung Jawab Etika dan Tanggung Jawab Ekonomi. Tanggung Jawab Etika adalah bagaimana suatu perusahaan menjadi perusahaan yang berperilaku etis, sedangkan Tanggung Jawab Ekonomi menjelaskan tanggung jawab perusahaan dalam meraih profit atau keuntungan. Setelah Tanggung Jawab Etika

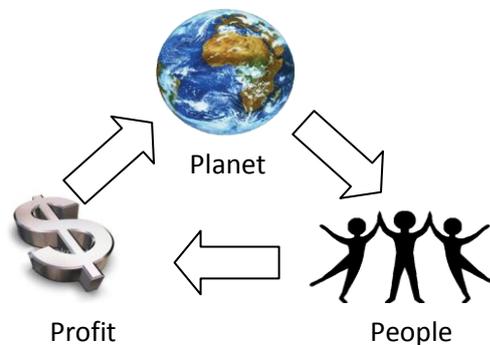
dan Ekonomi, jenjang selanjutnya adalah Tanggung Jawab Legal. Jenjang ini menjelaskan bagaimana perusahaan menjadi perusahaan yang taat pada hukum. Dan jenjang yang terakhir adalah Tanggung Jawab Filantropis. Tanggung Jawab Filantropis adalah bagaimana perusahaan menjadi perusahaan yang baik dan memiliki citra positif di mata masyarakat.

b. Teori Triple Bottom Line

Istilah *Triple Bottom Line* dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya “ *Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business* ”. Elkington mengembangkan konsep *Triple Bottom Line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*. Selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Hubungan ini diilustrasikan dalam gambar 2.2.

GAMBAR 2.2

TEORI TRIPLE BOTTOM LINE



Sumber: Wibisono (2007:32)

Teori *Triple Bottom Line* mencakup beberapa pertimbangan antara lain:

1. Untuk memenuhi regulasi, hukum dan aturan yang mengaturnya.
2. Sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan *image* yang positif.
3. Bagian dari strategi bisnis perusahaan.
4. Untuk memperoleh *licence to operate* dari masyarakat setempat.
5. Bagian dari *risk management* perusahaan untuk meredam atau menghindari konflik sosial.

Dalam konsep tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi finansialnya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Ketiga faktor ini sangat berkaitan namun terkadang bertentangan. Dari aspek-aspek tersebut, kriteria penilaian CSR digambarkan dalam tabel 2.1 berikut:

TABEL 2.1

ASPEK-ASPEK KRITERIA CSR

ASPEK	PERTANYAAN DASAR	KRITERIA CSR YANG BAIK	SUMBER DATA ATAU RESPONDEN
Profit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa besar proporsi uang yang dikeluarkan perusahaan untuk CSR? 2. Darimana pos anggaran CSR tersebut diambil, apakah diperhitungkan sebagai biaya perusahaan atau diambil dari laba kotor atau bersih perusahaan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran sekitar 2% yang disisihkan dari laba bersih perusahaan. 2. Semakin besarnya perhatian para penentu kebijakan perusahaan terhadap prioritas anggaran CSR. 	CEO, Board of Directors, pegawai atau staff perusahaan, LSM mitra, kontraktor.
Planet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa kegiatan CSR yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan? 2. Apa dampaknya bagi kondisi lingkungan sekitar? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program-program nyata pelestarian lingkungan. 2. Adanya sarana pengelolaan dampak lingkungan (misalnya limbah) 3. Adanya program yang berdampak positif bagi lingkungan. 4. Dampak negatif yang relatif kecil dan terkontrol pada kerusakan lingkungan. 	Pegawai perusahaan, kontraktor, <i>supplier</i> , pemerintah, masyarakat sekitar, LSM, media massa.
People	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa kegiatan CSR yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program-program nyata pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat 	Pegawai perusahaan,

	<p>2. Apa dampaknya bagi kondisi masyarakat, khususnya komunitas lokal?</p>	<p>(misalnya penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, modal usaha dan pelatihan wirausaha, kecakapan hidup).</p> <p>2. Adanya sistem perlindungan sosial terhadap kelompok-kelompok rentan, termasuk penghargaan terhadap kearifan lokal.</p> <p>3. Adanya program yang berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup, mata pencaharian dan kemandirian masyarakat.</p> <p>4. Dampak negatif yang relatif kecil dan terkontrol pada kerusakan sistem sosial (jarak sosial, kecemburuan sosial, konflik).</p>	<p>pemerintah, masyarakat sekitar, LSM, media massa.</p>
<p>Procedure</p>	<p>1. Bagaimana program CSR tersebut dilaksanakan?</p> <p>2. Apakah prosesnya dilakukan sesuai prosedur yang benar?</p>	<p>1. Dilakukan oleh lembaga yang “terpisah” dari perusahaan (misalnya bermitra dengan perguruan tinggi, LSM, atau organisasi lokal yang <i>credible</i>).</p> <p>2. Melibatkan ahli-ahli yang profesional di bidangnya.</p> <p>3. Integrasi CSR dengan kebijakan</p>	<p>Pegawai perusahaan, pemerintah, masyarakat sekitar, LSM, media massa, asosiasi</p>

		perusahaan. 4. Keterlibatan aktif dan dukungan kuat dari pemerintah, LSM, dan masyarakat, serta adanya koordinasi yang baik diantara mereka. 5. Perencanaan program, monitoring, dan evaluasi.	profesi, akademisi.
--	--	--	------------------------

Sumber: Wibisono (2007:32)

2.2.1 Dasar Laporan Tanggung Jawab Sosial

Pada bulan September 2004, ISO (*International Standard Organization*) sebagai induk organisasi standarisasi menerbitkan panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility* (Wibisono, 2007). ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility* mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh (draft 3, 2007).

Berdasarkan definisi tersebut, CSR mencakup tujuh komponen utama, yaitu :

1. Pengembangan masyarakat
2. Konsumen
3. Praktik kegiatan institusi yang sehat
4. Lingkungan
5. Ketenagakerjaan
6. Hak asasi manusia
7. *Organizational governance*

Ada beberapa alasan yang mendorong perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya, diantaranya:

1. Alasan sosial

Perusahaan melaksanakan CSR untuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Sebagai pihak luar yang beroperasi di wilayah orang lain, perusahaan dituntut untuk berlaku etis terhadap masyarakat sekitarnya. Perusahaan harus ikut serta dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan juga menjaga lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan.

2. Alasan ekonomi

Motif perusahaan dalam melakukan CSR tetap berujung pada motif mencari keuntungan. Perusahaan melakukan program CSR untuk menarik simpati masyarakat dengan membangun image positif yang pada akhirnya tetap bertujuan untuk meningkatkan profit.

3. Alasan hukum

UU PT No.40 Pasal 74 yang berisi kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam memperkuat pernyataan perusahaan melakukan CSR karena alasan hukum. CSR dilakukan perusahaan karena adanya tuntutan yang jika tidak dilakukan akan dikenai sanksi atau denda. Adapun isi dari pasal tersebut antara lain :

- a. Ayat 1, menjelaskan bahwa perseroan menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. Ayat 2, menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Ayat 3, menggariskan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, keberadaan peraturan ini justru membuat makna CSR semakin bias. CSR bukan lagi sebagai tanggung jawab sosial yang bersifat sukarela dari perusahaan bagi masyarakat sekitar namun berubah menjadi suatu keterpaksaan. Apapun alasannya, hendaknya perusahaan tetap berpijak pada prinsip dasar dari CSR itu sendiri.

2.2.2 Sifat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Pengungkapan (*disclose*) berarti penyampaian (*release*) informasi. Hendriksen (1991:203) mendefinisikan pengungkapan (*disclosure*) sebagai penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien.

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan ada yang sifatnya wajib dan ada pula yang sifatnya sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang wajib dilakukan perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu. Di Indonesia, pengungkapan wajib diatur oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-97/PM/1996, yang kemudian diubah menjadi surat keputusan ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 (peraturan VIII.G.7). Keputusan pengungkapan informasi wajib lainnya yang dikeluarkan oleh Bapepam adalah surat keputusan ketua Bapepam No. Kep-7/PM/1995 yang diubah menjadi keputusan ketua Bapepam No. Kep38/PM/1996 (peraturan VIII.G.2) yang berisi tentang aturan keharusan mengungkapkan informasi akuntansi kepada publik dalam laporan tahunan. Informasi yang wajib diungkapkan dalam laporan tahunan antara lain ikhtisar data keuangan penting, analisis dan pembahasan penting oleh manajemen, laporan keuangan yang telah diaudit, dan laporan manajemen.

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan, sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan dan yang dipandang relevan untuk membantu proses pengambilan keputusan dan meningkatkan nilai ekonomis melalui pengungkapan sukarelanya. Informasi yang diungkapkan melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang

berlaku. Pengungkapan sukarela menjadi perwujudan dari pengungkapan yang diperluas dan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan itu sendiri dengan mempertimbangkan faktor biaya dan manfaat (Chairir dan Ghozali, 2003 dalam Noormala, 2010). Salah satu cara manajer meningkatkan kredibilitas perusahaannya adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas. Perusahaan dapat menarik perhatian lebih banyak analis, meningkatkan akurasi ekspektasi pasar, menurunkan ketidaksimetrisan informasi pasar dan menurunkan kejutan pasar (*market surprise*) dengan melakukan pengungkapan yang lebih luas (Na'im dan Rakhman, 2000 dalam Zubaidah dan Zulfikar, 2005).

Menurut Henderson dan Peirson, adapun alasan-alasan perusahaan mengungkapkan kinerja sosial secara sukarela (Henny dan Murtanto, 2001: 27) antara lain:

- a. *Internal decision making*: manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas dari informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan. Data harus tersedia agar biaya dari pengungkapan tersebut dapat diperbandingkan dengan manfaatnya bagi perusahaan. Walaupun hal ini sulit diidentifikasi dan diukur namun analisis secara sederhana lebih baik daripada tidak sama sekali.
- b. *Product differentiation*: manajer dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial memiliki insentif untuk membedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat.

- c. *Enlightened self interest*: perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosialnya dengan para *stakeholder* yang terdiri dari *stockholder*, kreditor, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyarakat karena dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan.

2.2.3 Pengukuran Tanggung Jawab Sosial

Pertanggung jawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting*. *Sustainability Reporting* merupakan pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan, dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi serta produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainability Reporting* meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan, dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi (ACCA, 2004).

Darwin (2004) mengatakan bahwa *Corporate Sustainability Reporting* terbagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial (lihat dalam tabel 2.2). Sedangkan dalam Ayat 1 UU PT No.40 pasal 74 menjelaskan bahwa perseroan menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sehingga kategori kinerja ekonomi digunakan sebagai indikator pengungkapan sukarela dalam pengungkapan tanggung jawab sosial

Grey et. al. (1995) mengatakan bahwa sifat dan volume pelaporan mengenai pertanggung jawaban sosial perusahaan bervariasi antar waktu dan antar

negara. Hal ini disebabkan isu-isu yang dipandang penting oleh suatu negara mungkin akan menjadi kurang penting bagi negara lain. Lewis dan Unerman (1999) mengatakan bahwa variasi pelaporan tersebut disebabkan oleh budaya atau norma yang berlaku pada masing-masing negara.

TABEL 2.2

KATEGORI DALAM *CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING*

Kategori	Aspek
Kinerja Ekonomi	
Pengaruh ekonomi secara langsung	Pelanggan, pemasok, penyedia modal, dan sektor publik
Kinerja Lingkungan	
Hal-hal yang terkait dengan lingkungan	Bahan baku, energi, air, keanekaragaman hayati (<i>biodiversity</i>), emisi, sungai dan sampah, pemasok, produk dan jasa, pelaksanaan, dan angkutan
Kinerja Sosial	
Praktik kerja	Keamanan dan keselamatan tenaga kerja, pendidikan dan <i>training</i> , kesempatan kerja
Hak manusia	Strategi dan manajemen, non diskriminasi, kebebasan berserikat dan berkumpul, tenaga kerja dibawah umur, kedisiplinan, keamanan, dll
Sosial	Komunitas, korupsi, kompetisi, dan penetapan harga
Tanggung jawab produk	Kesehatan dan keamanan pelanggan, iklan yang peduli terhadap hak pribadi

Sumber: Darwin (2004)

Selain indikator yang diungkapkan oleh Darwin (2004) mengenai *Corporate Sustainability Reporting*, panduan pelaporan lain yang banyak digunakan perusahaan sebagai standar pelaporan saat ini untuk mendukung pembangunan berkesinambungan yang juga berkaitan dengan indikator Darwin adalah GRI (*Global Reporting Initiative*). GRI merupakan jaringan berbasis

organisasi yang telah memelopori perkembangan dunia, menggunakan kerangka laporan berkelanjutan paling banyak dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia. Standar GRI digagas oleh PBB lewat *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES) dan UNEP pada tahun 1997. Indikator pengungkapan tanggung jawab sosial menurut GRI ditampilkan dalam tabel 2.3 berikut :

TABEL 2.3

GLOBAL REPORTING INITIATIVE

A	<i>Economic (EC)</i>	<i>Performance Indicators</i>
	<i>Aspect: Economic Performance</i>	<i>EC1 (CORE) Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee compensation, donations and other community investments, retained earnings, and payments to capital providers and governments.</i> <i>EC2 (CORE) Financial implications and other risks and opportunities for the organization's activities due to climate change.</i> <i>EC3 (CORE) Coverage of the organization's defined benefit plan obligations.</i> <i>EC4 (CORE) Significant financial assistance received from government.</i>
	<i>Aspect: Market Presence</i>	<i>EC5 (ADD): Range of ratios of standard entry level wage compared to local minimum wage at significant locations of operation.</i> <i>EC6 (CORE): Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers at significant</i>

		<p><i>locations of operation.</i></p> <p>EC7 (CORE): <i>Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from the local community at significant locations of operation.</i></p>
	<p><i>Aspect:</i> <i>Indirect Economic Impacts</i></p>	<p>EC8 (CORE): <i>Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for public benefit through commercial, in-kind, or pro bono engagement.</i></p> <p>EC9 (ADD): <i>Understanding and describing significant indirect economic impacts, including the extent of impacts.</i></p>
B	Environment (EN)	Performance Indicators
	<p><i>Aspect:</i> <i>Materials</i></p>	<p>EN1 (CORE): <i>Materials used by weight or volume.</i></p> <p>EN2 (CORE): <i>Percentage of materials used that are recycled input materials.</i></p>
	<p><i>Aspect:</i> <i>Energy</i></p>	<p>EN3 (CORE): <i>Direct energy consumption by primary energy source.</i></p> <p>EN4 (CORE) <i>Indirect energy consumption by primary source.</i></p> <p>EN5 (ADD) <i>Energy saved due to conservation and efficiency improvements.</i></p> <p>EN6 (ADD) <i>Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy-based products and services, and reductions in energy requirements as a result of these initiatives.</i></p> <p>EN7 (ADD) <i>Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved.</i></p>
	<p><i>Aspect:</i> <i>Water</i></p>	<p>EN8 (CORE): <i>Total water withdrawal by source.</i></p> <p>EN9 (ADD): <i>Water sources significantly affected by withdrawal of water.</i></p> <p>EN10 (ADD): <i>Percentage and total volume of water recycled and reused.</i></p>

	<p><i>Aspect: Biodiversity</i></p>	<p><i>EN11 (CORE): Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas.</i></p> <p><i>EN12 (CORE): Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas.</i></p> <p><i>EN13 (ADD): Habitats protected or restored.</i></p> <p><i>EN14 (ADD): Strategies, current actions, and future plans for managing impacts on biodiversity.</i></p> <p><i>EN15 (ADD): Number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk.</i></p>
	<p><i>Aspect: Emissions, Effluents, and Waste</i></p>	<p><i>EN16 (CORE): Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight.</i></p> <p><i>EN17 (CORE): Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight.</i></p> <p><i>EN18 (ADD): Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved.</i></p> <p><i>EN19 (CORE): Emissions of ozone-depleting substances by weight.</i></p> <p><i>EN20 (CORE): NO_x, SO_x, and other significant air emissions by type and weight.</i></p> <p><i>EN21 (CORE): Total water discharge by quality and destination.</i></p> <p><i>EN22 (CORE): Total weight of waste by type and disposal method.</i></p> <p><i>EN23 (CORE): Total number and volume of significant spills.</i></p> <p><i>EN24 (ADD): Weight of transported, imported, exported, or</i></p>

		<p>treated waste deemed hazardous under the terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped internationally.</p> <p>EN25 (ADD): Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats significantly affected by the reporting organization's discharges of water and runoff.</p>
	<p>Aspect: Products and Services</p>	<p>EN26 (CORE): Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extent of impact mitigation.</p> <p>EN27 (CORE): Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category.</p>
	<p>Aspect: Compliance</p>	<p>EN28 (CORE): Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for noncompliance with environmental laws and regulations.</p>
	<p>Aspect: Transport</p>	<p>EN29 (ADD): Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials used for the organization's operations, and transporting members of the workforce.</p>
	<p>Aspect: Overall</p>	<p>EN30 (ADD): Total environmental protection expenditures and investments by type.</p>
C	Human Right (HR)	Performance Indicators
	<p>Aspect: Investment and Procurement Practices</p>	<p>HR1 (CORE): Percentage and total number of significant investment agreements that include human rights clauses or that have undergone human rights screening.</p> <p>HR2 (CORE): Percentage of significant suppliers and contractors that have undergone screening on human rights and actions taken.</p> <p>HR3 (ADD): Total hours of employee training on policies and procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations, including the percentage of employees trained.</p>

	<i>Aspect: Non-discrimination</i>	<i>HR4 (CORE): Total number of incidents of discrimination and actions taken.</i>
	<i>Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining</i>	<i>HR5 (CORE): Operations identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be at significant risk, and actions taken to support these rights.</i>
	<i>Aspect: Child Labor</i>	<i>HR6 (CORE): Operations identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken to contribute to the elimination of child labor.</i>
	<i>Aspect: Forced and Compulsory Labor</i>	<i>HR7 (CORE): Operations identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and measures taken to contribute to the elimination of forced or compulsory labor.</i>
	<i>Aspect: Security Practices</i>	<i>HR8 (ADD): Percentage of security personnel trained in the organization's policies or procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations.</i>
	<i>Aspect: Indigenous Rights</i>	<i>HR9 (ADD): Total number of incidents of violations involving rights of indigenous people and actions taken.</i>
D	<i>Labor Practices & Decent Work (LA)</i>	<i>Performance Indicators</i>
	<i>Aspect: Employment</i>	<i>LA1 (CORE): Total workforce by employment type, employment contract, and region LA2 (CORE): Total number and rate of employee turnover by age group, gender, and region. LA3 (ADD): Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by major operations.</i>
	<i>Aspect: Labor/ Management Relations</i>	<i>LA4 (CORE): Percentage of employees covered by collective bargaining agreements. LA5 (CORE): Minimum notice period(s) regarding significant operational changes, including whether it is specified in collective</i>

		<i>agreements.</i>
	<i>Aspect: Occupational Health and Safety</i>	<p><i>LA6 (ADD): Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety committees that help monitor and advise on occupational health and safety programs.</i></p> <p><i>LA7 (CORE): Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total number of work-related fatalities by region.</i></p> <p><i>LA8 (CORE): Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to assist workforce members, their families, or community members regarding serious diseases.</i></p> <p><i>LA9 (ADD): Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions. Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions.</i></p>
	<i>Aspect: Training and Education</i>	<p><i>LA10 (CORE): Average hours of training per year per employee by employee category.</i></p> <p><i>LA11 (ADD): Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and assist them in managing career endings.</i></p> <p><i>LA12 (ADD): Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews.</i></p>
	<i>Aspect: Diversity and Equal Opportunity</i>	<p><i>LA13 (CORE): Composition of governance bodies and breakdown of employees per category according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity.</i></p> <p><i>LA14 (CORE): Ratio of basic salary of men to women by employee category.</i></p>
E	Product Responsibility (PR)	Performance Indicators
	<i>Aspect: Customer Health and Safety</i>	<i>PR1 (CORE): Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are assessed</i>

		<p>for improvement, and percentage of significant products and services categories subject to such procedures.</p> <p>PR2 (ADD): Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning health and safety impacts of products and services, by type of outcomes.</p>
	<p>Aspect: <i>Product and Service Labeling</i></p>	<p>PR3 (CORE): Type of product and service information required by procedures, and percentage of significant products and services subject to such information requirements. D</p> <p>PR4 (ADD): Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service information and labeling, by type of outcomes.</p> <p>PR5 (ADD): Practices related to customer satisfaction, including results of surveys measuring customer satisfaction.</p>
	<p>Aspect: <i>Marketing Communications</i></p>	<p>PR6 (CORE): Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship.</p> <p>PR7 (ADD): Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship, by type of outcomes.</p>
	<p>Aspect: <i>Customer Privacy</i></p>	<p>PR8 (ADD): Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data.</p>
	<p>Aspect: <i>Compliance</i></p>	<p>PR9 (CORE): Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning the provision and use of products and services.</p>
F	Society (SO)	Performance Indicators
	<p>Aspect: <i>Community</i></p>	<p>SO1 (CORE): Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and</p>

		<i>manage the impacts of operations on communities, including entering, operating, and exiting.</i>
	<i>Aspect: Corruption</i>	<i>SO2 (CORE): Percentage and total number of business units analyzed for risks related to corruption. SO3 (CORE): Percentage of employees trained in organization's anti-corruption policies and procedures. SO4 (CORE): Actions taken in response to incidents of corruption.</i>
	<i>Aspect: Public Policy</i>	<i>SO5 (CORE): Public policy positions and participation in public policy development and lobbying. SO6 (ADD): Total value of financial and in-kind contributions to political parties, politicians, and related institutions by country.</i>
	<i>Aspect: Anti-Competitive Behavior</i>	<i>SO7 (CORE): Total number of legal actions for anticompetitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes.</i>
	<i>Aspect: Compliance</i>	<i>SO8 (CORE): Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for noncompliance with laws and regulations.</i>

Sumber: *Global Reporting Initiative (2006)*

2.3 Faktor Penentu Sifat Pengungkapan Sukarela Tanggung Jawab Sosial

2.3.1 Kepemilikan Manajemen

Kepemilikan manajemen menggambarkan jumlah lembar saham yang dimiliki manajemen. Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajemen, semakin tinggi pula motivasi untuk mengungkapkan aktivitas perusahaan yang dilakukan (Fama dan Jensen, 1983). Kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap pengeluaran program CSR, namun pada suatu titik tertentu hal tersebut dapat

mengurangi nilai perusahaan dan batasan yang telah dicapai sehingga menyebabkan suatu hubungan negatif (Morck *et al.*, 1988).

Penelitian Nasir dan Abdullah (2004) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dalam hubungan antara kepemilikan saham manajerial terhadap luas pengungkapan CSR. Hal senada juga disampaikan oleh Anggraini (2006) yang menemukan adanya hubungan positif antara kepemilikan manajemen dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajemen yang besar dan termasuk dalam industri yang memiliki risiko politis yang tinggi cenderung mengungkapkan informasi sosial lebih banyak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Rosmasita (2007) yang menemukan bahwa kepemilikan saham manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia. Namun ketidakkonsistenan hasil ditunjukkan oleh penelitian Said *et al.* (2009) yang menemukan bahwa kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

2.3.2 *Leverage*

Leverage merupakan rasio untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai oleh utang atau proporsi total utang terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Semakin tinggi *leverage*, besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan pelanggaran terhadap kontrak utang, sehingga manajer akan melaporkan laba saat ini lebih tinggi dibandingkan laba

masa depan (Scott, 2000). Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang dan manajer akan memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang. Penelitian yang dilakukan Ainun Nai'im dan Fu'ad Rakhman (2000) membuktikan bahwa rasio *lecerage* memiliki hubungan yang positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3.3 Profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin rinci pula informasi yang diberikan oleh manajer sebab pihak manajemen ingin meyakinkan investor tentang profitabilitas perusahaan dan kompensasi terhadap manajer. Penelitian yang dilakukan Bowman dan Haire (1976) dan Preston (1978) dalam Hackston dan Milne (1996) mendukung adanya hubungan profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan penelitian yang dilakukan Hackston dan Milne (1996); Belkaoui dan Karpik (1989); Sembiring (2005) dan Anggraeni (2006) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3.4 Ukuran Perusahaan

Menurut ukurannya, perusahaan dibagi menjadi dua yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil. Ukuran tersebut menggambarkan besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang besar memiliki

biaya yang lebih besar daripada perusahaan yang kecil (Marwata, 2001), oleh karena itu perusahaan yang besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan tersebut.

Perusahaan yang memiliki sumber daya yang relatif kecil tidak akan melakukan pengungkapan seluas perusahaan besar. Perusahaan yang kecil tentu saja mengalami persaingan yang lebih ketat dengan para kompetitornya. Apabila perusahaan tersebut mengungkapkan informasi terlalu banyak mengenai hal-hal yang bersifat internal kepada *stakeholder*, justru akan membahayakan keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Beberapa penelitian yang menguji hubungan variabel ini menunjukkan hasil yang relatif berbeda. Sigh dan Ahuja (1983); Ng (1985); dan Roberts (1992) menyatakan tidak ada hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan penelitian yang dilakukan Belkaoui dan Krapik (1989); Adam *et. al.* (1995, 1998); Hackston dan Milne (1996); Hasibuan (2001); Sembiring (2005); dan Anggraini (2006) justru mendukung adanya hubungan antara kedua variabel tersebut.

2.3.5 Tipe Industri

Tipe industri secara tidak langsung menggambarkan sejauh mana keterkaitan perusahaan dengan sumber daya alam sebagai bahan baku dalam proses produksinya. Perusahaan yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam cenderung lebih berpengaruh terhadap lingkungan. Cooke (dalam Suropto, 2000) menyatakan bahwa luas pengungkapan dalam laporan tahunan mungkin

tidak sama untuk semua sektor ekonomi, hal ini dikarenakan perbedaan sifat dan karakteristik industri. Menurut keterkaitannya dengan sumber daya alam, tipe industri dibagi menjadi dua , yaitu industri pabrikasi atau manufaktur dan industri non manufaktur.

Penelitian yang dilakukan oleh Suropto (2000) mengelompokkan industri menjadi dua, yaitu perusahaan perbankan dan non perbankan, namun hasilnya tidak signifikan. Subiyantoro (dalam Rahayu, 2006) mengelompokkan industri ke dalam perusahaan manufaktur dan non manufaktur, namun hasilnya tidak signifikan. Penelitian Rahayu (2006) mengelompokkan industri ke dalam perusahaan jasa dan non jasa (riil), namun hasilnya juga tidak signifikan. Hasil signifikan diperoleh dalam penelitian Yuningsih (2003) dan Sembiring (2005) yang mengelompokkan industri ke dalam industri *high profile* dan *low profile*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang bertipe *high profile* dalam melakukan aktivitasnya banyak memodifikasi lingkungan dan menimbulkan dampak sosial yang negatif terhadap masyarakat, atau secara luas terhadap *stakeholdernya*.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai CSR sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian serupa diantaranya meneliti adanya hubungan antara karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Heckston dan Milne (1996) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sosial di Selandia Baru. Dengan metode *content analysis* dan menggunakan *checklist* sebagai alat untuk menentukan pengungkapan sosial dan lingkungan, Heckston dan

Milne menemukan bahwa ukuran perusahaan dan tipe industri mempengaruhi pengungkapan sosial dan lingkungan di Selandia Baru.

Suripto (1999) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Dalam penelitiannya, karakteristik perusahaan dicerminkan dengan ukuran perusahaan, *leverage*, rasio likuiditas, basis kepemilikan perusahaan, adanya PAKDES 1987, serta penerbitan sekuritas bank dan non bank. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel ukuran perusahaan dan penerbitan sekuritas secara signifikan paling berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela, dibandingkan lima variabel lainnya.

Seperti Suripto, Marwata (2001) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kualitas pengungkapan sukarela. Oleh Marwata, karakteristik perusahaan dicerminkan dengan ukuran perusahaan, rasio *leverage*, basis perusahaan, umur perusahaan, dan penerbitan sekuritas tahun berikutnya serta struktur kepemilikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan penerbitan sekuritas tahun sebelumnya memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan sukarela.

Sembiring (2005) meneliti hubungan antara karakteristik perusahaan dengan pengungkapan CSR di Indonesia. Karakteristik perusahaan dicerminkan oleh ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, tipe industri, profitabilitas, dan *leverage*. Hasilnya adalah bahwa ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris dan tipe industri mempengaruhi pengungkapan CSR di Indonesia.

Pada tahun 2006, penelitian yang sama juga dilakukan oleh Anggraini mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan manajemen, tipe industri, profitabilitas, dan *leverage* terhadap pengungkapan CSR oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dengan metode *content analysis*, Anggraini menemukan bahwa kepemilikan manajemen dan tipe industri berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR oleh perusahaan di Indonesia.

TABEL 2.4

RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti	Variabel Penelitian	Model Analisis	Hasil Penelitian
Heckston dan Milne (1996)	Ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas perusahaan.	Regresi Berganda	Adanya hubungan positif signifikan antara ukuran perusahaan dan tipe industri terhadap pengungkapan sosial perusahaan sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial perusahaan.
Suripto (1999)	Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , rasio likuiditas, basis kepemilikan perusahaan, adanya PAKDES 1987, dan penerbitan sekuritas bank dan non bank.	Regresi berganda	Adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan dan penerbitan sekuritas bank dan non bank terhadap kualitas pengungkapan sukarela. Sedangkan <i>leverage</i> , rasio likuiditas, kepemilikan manajemen, dan adanya PAKDES 1987 tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan sukarela.
Marwata (2001)	Ukuran perusahaan, rasio <i>leverage</i> , basis perusahaan, umur perusahaan, penerbitan	Rgresi Berganda	Adanya hubungan yang positif signifikan antara ukuran perusahaan dan penerbitan sekuritas tahun

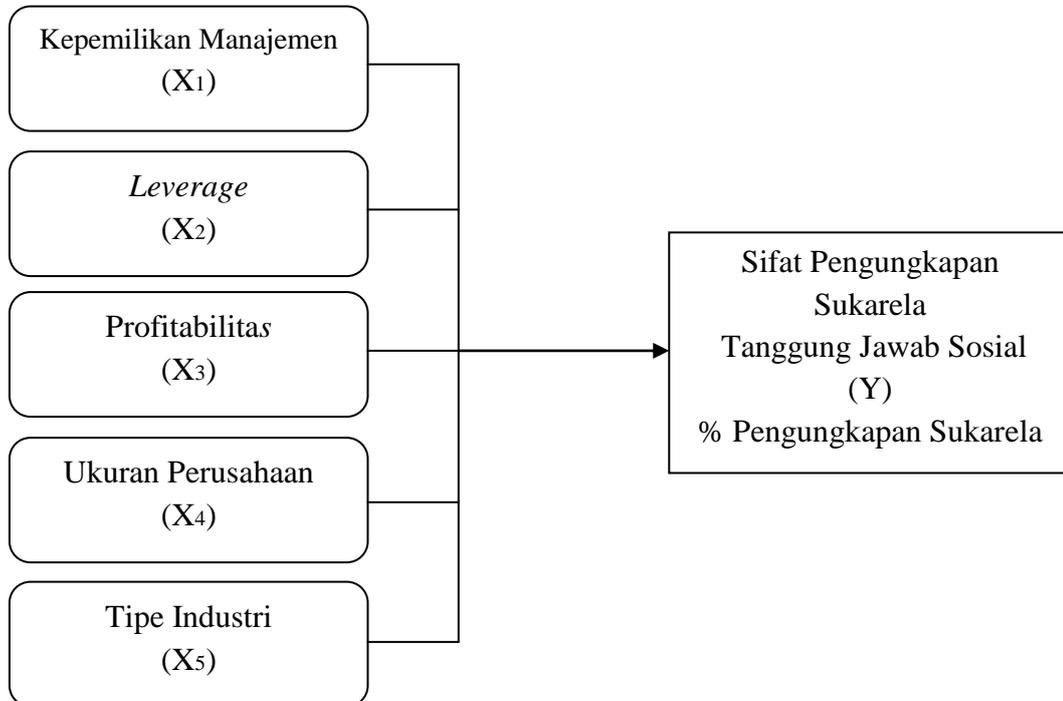
	sekuritas tahun berikutnya, dan struktur kepemilikan.		sebelumnya terhadap kualitas pengungkapan sukarela. Sedangkan <i>leverage</i> , basis perusahaan, umur perusahaan, dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan sukarela.
Sembiring (2005)	Ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, tipe industri, profitabilitas, dan <i>leverage</i> .	Regresi Berganda	Adanya pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan tipe industri terhadap pengungkapan CSR di Indonesia. Sedangkan profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia.
Anggraini (2006)	Ukuran perusahaan, kepemilikan manajemen, tipe industri, profitabilitas, dan <i>leverage</i> .	Regresi Berganda	Adanya pengaruh yang signifikan antara kepemilikan manajemen dan tipe industri terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi sifat pengungkapan tanggung jawab sosial yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan tipe industri. Untuk itu dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

GAMBAR 2.3

KERANGKA PEMIKIRAN



2.6 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sifat pengungkapan tanggung jawab sosial dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

2.6.1 Pengaruh Kepemilikan Manajemen terhadap Sifat Pengungkapan Sukarela Tanggung Jawab Sosial

Kepemilikan manajemen menggambarkan jumlah lembar saham yang dimiliki manajemen. Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajemen, semakin tinggi pula motivasi untuk mengungkapkan aktivitas perusahaan yang dilakukan (Fama dan Jensen, 1983). Kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap

pengeluaran program CSR, namun pada suatu titik tertentu hal tersebut dapat mengurangi nilai perusahaan dan batasan yang telah dicapai sehingga menyebabkan suatu hubungan negatif (Morck *et al.*, 1988).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap sifat pengungkapan sukarela tanggung jawab sosial

2.6.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Sifat Pengungkapan Sukarela Tanggung Jawab Sosial

Leverage merupakan rasio untuk mengatur besarnya aktiva yang dibiayai oleh utang atau proporsi total utang terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dibanding perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih rendah. Semakin tinggi *leverage*, semakin besar kemungkinan manajer akan melaporkan laba saat ini lebih tinggi dibandingkan laba masa depan (Scott, 2000)

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₂ : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap sifat pengungkapan sukarela tanggung jawab sosial

2.6.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Sifat Pengungkapan Sukarela Tanggung Jawab Sosial

Profitabilitas merupakan faktor yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin rinci pula informasi yang diberikan oleh manajer sebab pihak manajemen ingin meyakinkan investor tentang profitabilitas perusahaan dan kompensasi terhadap manajer.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap sifat pengungkapan tanggung jawab sosial

2.6.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Sifat Pengungkapan Sukarela Tanggung Jawab Sosial

Ukuran perusahaan menggambarkan besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan teori agensi, perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan yang lebih kecil (Marwata, 2001), oleh karena itu, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak untuk mengurangi biaya keagenan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap sifat pengungkapan tanggung jawab sosial

2.6.5 Pengaruh Tipe Industri terhadap Sifat Pengungkapan Sukarela Tanggung Jawab Sosial

Tipe industri menggambarkan sejauh mana keterkaitan perusahaan dengan sumber daya alam sebagai bahan baku dalam mendukung proses produksinya. Perusahaan yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam cenderung memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Menurut keterikatannya dengan sumber daya alam, tipe industri dibagi menjadi dua, yaitu industri pabrikan atau manufaktur dan industri non manufaktur.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keempat yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₅ : Tipe industri berpengaruh positif terhadap sifat pengungkapan tanggung jawab sosial

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sifat pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009 sehingga perlu dilakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan dengan cara mengukur variabel yang diteliti..

3.1.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah sifat pengungkapan sukarela tanggung jawab sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah data yang diungkapkan perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan (Hackston dan Milne, 1996). Berdasarkan sifatnya, pengungkapan tanggung jawab sosial dibagi menjadi dua, yaitu wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Definisi operasional dari sifat pengungkapan sukarela tanggung jawab sosial yang diterapkan dalam penelitian ini adalah prosentase pengungkapan sukarela, yakni prosentase dari Kinerja Ekonomi (*Economic/EC*) berdasarkan indikator GRI yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan dan didasarkan pada Ayat 1 Pasal 74 UU PT Nomor 40 Tahun 2007.

GRI digunakan sebagai indikator pengungkapan tanggung jawab sosial dengan total 79 item pengungkapan antara lain: 9 item pengungkapan dalam Aspek Ekonomi, 30 item pengungkapan dalam Aspek Lingkungan, 9 item pengungkapan dalam Aspek Hak-hak Manusia, 14 item pengungkapan dalam aspek Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak, 9 item pengungkapan dalam aspek Tanggung Jawab Produk, serta 8 item pengungkapan dalam Aspek Sosial.

Metode *Content Analysis* digunakan untuk melihat pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan. *Content analysis* adalah suatu metode pengkodifikasian teks dari ciri-ciri yang sama untuk ditulis dalam berbagai kelompok (kategori) tergantung pada kriteria yang ditentukan (Guthrie, et al., 2003). Nilai 1 digunakan jika terdapat pengungkapan sesuai dengan indikator GRI, sedangkan nilai 0 digunakan jika tidak terdapat pengungkapan atau terdapat pengungkapan tidak sesuai dengan indikator GRI. Semakin banyak item yang diungkapkan oleh perusahaan, maka indeksny akan semakin tinggi. Perusahaan dengan angka indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah mengungkapkan informasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan angka indeks yang lebih rendah.

3.1.2 Variabel Independen (X)

3.1.2.1 Kepemilikan Manajemen (X₁)

Kepemilikan manajemen adalah jumlah lembar saham yang dimiliki manajemen. Kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap pengeluaran

program CSR, namun pada suatu titik tertentu hal tersebut dapat mengurangi nilai perusahaan dan batasan yang telah dicapai sehingga menyebabkan suatu hubungan negatif (Morck *et al.*, 1988). Variabel kepemilikan manajemen diukur dengan besarnya prosentase lembar saham yang dimiliki manajemen dari jumlah lembar saham keseluruhan

3.1.2.2 Leverage (X₂)

Leverage merupakan rasio untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai oleh utang atau proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham. *Leverage* dapat diartikan sebagai tingkat ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya, dengan demikian *leverage* juga mencerminkan tingkat resiko keuangan perusahaan, Sembiring (2005). Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* adalah *Debt To Equity Ratio* (DER). Adapun pengukurannya menggunakan rumus :

$$DER = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Ekuitas}}$$

3.1.2.3 Profitabilitas (X₃)

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin rinci informasi yang diberikan manajer, sebab pihak manajemen ingin

meyakinkan investor tentang profitabilitas perusahaan dan kompensasi terhadap manajer. Profitabilitas juga diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham.

Terdapat beberapa ukuran untuk menentukan profitabilitas perusahaan, yaitu : *return of equity* (ROE) (Heckston dan Milne, 1996), *return on assets* (ROA) (Belkaoui dan Karpik, 1989; Heckston dan Milne, 1996), *earning per share* (EPS) (Sembiring, 2005), dan *net profit margin* (NPM) (Anggraeni, 2006). Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan ini adalah *Return on Asset* (ROA). *Return on asset* (ROA) merupakan ukuran efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Adapun pengukurannya menggunakan rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

3.1.2.4 Ukuran Perusahaan (X4)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengukur besar kecilnya perusahaan yang menggambarkan besarnya asset atau total aktiva yang dimiliki perusahaan. Menurut Heckston dan Milne (1996) dari beberapa penelitian, ukuran perusahaan dapat diukur dengan jumlah karyawan, total nilai aset, volume penjualan, atau peringkat indeks. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan adalah total aktiva. Dalam penelitian

ini variabel ukuran perusahaan disajikan dalam bentuk logaritma, karena nilai dan sebarannya yang besar dibandingkan variabel yang lain. Adapun pengukurannya menggunakan rumus :

$$SIZE = Total\ aktiva\ perusahaan$$

$$SIZE = \log_{10} Total\ aktiva\ perusahaan$$

3.1.2.5 Tipe Industri (X₅)

Tipe industri adalah tipe perusahaan berdasarkan keterkaitan perusahaan dengan sumber daya alam sebagai bahan baku dalam proses produksinya. Menurut keterkaitannya dengan sumber daya alam, tipe industri dibagi menjadi dua, yaitu industri pabrikan atau manufaktur dan industri non manufaktur. Variabel tipe industri diukur dengan cara dummy, yaitu untuk perusahaan manufaktur diberi nilai 0 dan untuk perusahaan non manufaktur diberi nilai 1.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009 yang berjumlah 399 perusahaan dan dimuat dalam *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD). Periode tahun 2009 dipilih karena merupakan data terbaru yang bisa diperoleh dan diharapkan dengan periode waktu tersebut akan diperoleh hasil yang lebih baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sifat pengungkapan tanggung jawab sosial.

Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*, dengan harapan peneliti mendapatkan informasi dari kelompok sasaran spesifik (Sekaran, 2003).

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel adalah:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan lengkap termasuk pengungkapan sosial dan tersedia untuk publik.
3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

TABEL 3.1

SAMPEL PENELITIAN

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009	399
Perusahaan yang belum menerbitkan laporan tahunan 2009 menurut BEI per Mei 2011	(180)
Data tidak lengkap, tidak jelas, dan/atau rusak	(148)
Total sampel yang digunakan	71

Sumber: Data sekunder 2009 (diolah)

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009. Alasan dipilihnya data sekunder dalam penelitian ini didasarkan pada alasan:

1. Data mudah diperoleh, hemat waktu dan biaya.

2. Data dalam laporan tahunan telah digunakan dalam berbagai penelitian baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Data dalam laporan tahunan yang tersedia di BEI memiliki reliabilitas yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya karena telah diaudit oleh auditor independen.

Laporan tahunan perusahaan yang dijadikan objek adalah laporan tahunan perusahaan periode tahun 2009 karena data tersebut adalah data terbaru dan terlengkap pada saat dilakukan penelitian. Sementara laporan tahunan perusahaan tahun 2010 belum banyak diterbitkan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode studi dokumentasi dengan mendapatkan data berupa laporan tahunan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tahun 2009. Data tersebut diperoleh melalui situs yang dimiliki oleh BEI, yakni www.idx.co.id, pojok BEI Universitas Diponegoro dan *Indonesia Capital Market directory* (ICMD). Studi pustaka atau literatur melalui buku teks, jurnal ilmiah, artikel dan majalah, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan juga dijadikan sumber pengumpulan data.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai *minimum*, nilai *maximum*, *mean*, dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu model regresi. Model regresi yang baik harus memiliki distribusi data normal atau mendekati normal dan bebas dari asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Sebelum dilakukan analisis terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap penyimpangan asumsi klasik, dengan tahapan sebagai berikut :

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel residual mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, digunakan dua cara yaitu analisis grafik dan analisis statistik dengan Kolmogorov-Smirnov (K-S).

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel-variabel bebas saling berkorelasi. Multikolinieritas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna atau hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2006). Untuk menguji adanya tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Batas untuk nilai *tolerance* adalah 0,10 dan batas VIF adalah 10 (Ghozali, 2005). Jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinieritas

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual 1 pengamat ke pengamat yang lain (Ghozali, 2006). Jika *variance* dari residual 1 pengamat ke pengamat lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dapat dilakukan pula dengan melihat ada tidaknya *pole* tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dengan ZPRED dimana sumbu Y

adalah \hat{Y} yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*. Cara lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah dengan melakukan Uji Glejser untuk melihat nilai signifikansi semua variabel.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ yang merupakan periode sebelumnya (Ghozali, 2006). Masalah autokorelasi terjadi jika terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini, ada tidaknya autokorelasi diuji dengan melihat nilai Durbin Watson (DW) dibandingkan dengan nilai du dan $(4-du)$. Nilai Dw haruslah berada di antara nilai du dan $(4-du)$.

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajemen, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tipe industri. Sedangkan variabel dependennya adalah sifat pengungkapan tanggung jawab sosial. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon_t$$

Keterangan :

Y : Sifat pengungkapan tanggung jawab sosial

α_0 : Konstanta

X₁ : Kepemilikan Manajemen

X₂ : *Leverage*

X₃ : Profitabilitas

X₄ : Ukuran Perusahaan

X₅ : Tipe Industri

$\beta_1 \dots \beta_4$: Koefisien X₁...X₄

ε_t : Error

3.5.3.1 Uji F (Uji Simultan)

Menurut Ghozali (2006) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan kelima variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan kelima variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.3.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

3.5.3.3 Uji Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji t (Uji Parsial). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.